



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
													v																		

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

A1

WARGA Wijaya Kusuma 1 RT 46 Kelurahan Karang Anyar, merasa resah dengan kondisi genangan air di wilayah mereka dalam durasi lama, yang baru terjadi beberapa waktu belakangan saat terjadi hujan deras. Sedikitnya ada sembilan rumah tergenang. Dikatakan Ketua RT 46 Kelurahan Karang Anyar H. Adi, sebelumnya memang diakui sering terjadi banjir di wilayah ini ketika hujan turun.

ATASI BANJIR, PIHAK TERKAIT CARI SOLUSI

Segera Tinjau Pemukiman Warga

Namun, saat hujan reda, banjir tersebut juga surut. "Sekarang banjir lambat surut," ungkapnya kepada *Radar Tarakan* kemarin (13/4).

Adi bersama warganya pun mengklaim keparahan ini terjadi akibat adanya pemotongan bukit yang diproyeksikan menjadi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltara. "Dulu tidak separah ini, tapi sekarang hujan berhenti air tetap menggenang. Tadi (kemarin, *Red.*) subuh, sekitar jam 5 sampai jam 6 hujan deras, tapi sampai jam 9 airnya tidak surut. Menggenang sampai betis orang dewasa," kata Adi.

Dari permasalahan ini, kata Adi, sudah disampaikan kepada pihak kontraktor proyek tersebut, yang akhirnya menjanjikan akan membuat drainase guna menghindari masuknya air ke pemukiman warga.

Namun, proyek pembangunan yang sudah berjalan sekitar lima bulan ini, hingga kini belum dibuatkannya drainase. "Kami mengharapkan banjir ini bisa teratasi," ujarnya.

Warga pun mengajukan masalah ini ke tingkat pemerintah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR), serta Inspektorat dan pihak BPK Kaltara sendiri, hingga dilaksanakan pertemuan kemarin.

Ditemui usai pertemuan, Kepala Sekretariat BPK Kaltara Ridwan Sani menjelaskan bahwa banjir yang dialami warga RT 46 bukan sepenuhnya akibat proyek pengadaan lahan untuk pembangunan kantor BPK Kaltara. Meski begitu, pihaknya tetap akan mencari solusi terbaik terhadap penanganan banjir ini, walaupun masih tanggungan pihak pemilik lahan. "Banjir tersebut bukan hanya karena itu. Namun, RT 46 ini memang daerah cekungan, artinya air yang ada di pemukiman RT 46 juga yang men-

galir deras dengan menimbulkan efek besar terhadap RT 46 ini," ujar Ridwan.

"Tapi kami tidak serta-merta melepas tanggung jawab, kami akan fasilitasi bagaimana yang terbaik. Kami akan berkontribusi dan tidak akan mengacuhkan masalah ini," ujar Ridwan.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Ridwan mengatakan akan melakukan tinjau lapangan bersama pihak DPU-TR dalam waktu dekat, guna mencari solusi penanganan banjir tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan pelaksana proyek gedung BPK Kaltara terhadap penanganan banjir ini sebelumnya sudah dilakukan, yakni dengan membangun siring penahan masuknya lumpur ke pemukiman warga. Bahkan sejak 2013, juga telah direncanakan untuk pembangunan drainase, namun hingga kini masih terhambat akibat permasalahan lahan. **(*udn/ash)**